

CITA-CITA POLITIK KITA

Oleh Nurcholish Madjid

Perjuangan Islam Ditinjau Kembali

Jika bentuk ideal umat Islam itu beserta tugas kewajibannya untuk kemanusiaan harus diungkapkan dalam kalimat singkat, maka yang paling baik ialah mengutip al-Qur'an tentang gambaran yang diberikan untuk masyarakat Islam di masa Rasulullah *saw*: *"Kamu adalah sebaik-baik umat yang diketengahkan untuk manusia, karena kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, lagi pula kamu percaya kepada Tuhan,"* (Q 3:110). Perjuangan Islam sepanjang sejarahnya dapat dilihat sebagai usaha kaum Muslim memenuhi gambaran al-Qur'an itu, khususnya berkenaan dengan tugas kewajibannya bagi kemanusiaan. Tugas itu juga sering diungkapkan dalam kalimat aslinya dalam bahasa Arab, yaitu *"al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar"* (amar makruf nahi munkar). Karena tugas amar makruf nahi munkar itulah umat Islam selalu terlibat dalam perjuangan melawan setiap bentuk kezaliman, setidak-tidaknya begitulah seharusnya. Maka wajar sekali bahwa umat Islam Indonesia sepanjang sejarahnya juga dikenal sebagai penentang-penentang gigih imperialisme. Juga bukanlah suatu kebetulan bahwa gerakan kebangsaan Indonesia yang mula-mula tumbuh secara sebenarnya berbentuk organisasi massa dalam arti modern muncul dari kalangan kaum Muslim melalui Syarekat Islam. Dan ternyata Syarekat Islam tidak hanya menjadi katalisator kebangkitan nasionalisme bercorak Islam saja,

tetapi juga yang becorak Marksis (suatu pertumbuhan dari “S.I. Merah”) dan yang bercorak nasionalisme (tiruan) Barat khususnya menurut gaya Bung Karno yang adalah anak asuhan politik HOS Tjokroaminoto.

Di samping menghargai dan bersikap terima kasih kepada kaum Muslim terdahulu yang telah berjuang itu, kita saat sekarang juga memiliki kemudahan bahkan “kemewahan” untuk melihat kelemahan-kelemahan perjuangan mereka dan mengambil pelajaran daripadanya. Tetapi untuk adilnya haruslah ditegaskan bahwa dalam penglihatan kita mereka itu mempunyai kelemahan mungkin bukan dalam ukuran situasi mereka saat itu, melainkan jelas dari ukuran *tuntutan perkembangan masyarakat kita sekarang ini*. Dan kelemahan itu jelas pula tidak semuanya merupakan tanggung jawab para pejuang Islam itu sendiri. Misalnya, ketidakmampuan mereka menuangkan ide-ide perjuangan mereka ke dalam kerangka intelektual yang utuh dan sistematis sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sekalipun mereka mempunyai kesadaran yang tinggi akan tugas-kewajiban mereka, namun mereka kekurangan kemampuan dalam segi teknis pelaksanaan. Tampaknya mereka menyadari apa yang seharusnya, namun tanpa pengetahuan memadai tentang segi bagaimana. Bahkan dalam hal apa yang seharusnya itu pun masih terdapat banyak sekali ketidakjelasan. Inilah yang menyebabkan mengapa di masa yang sudah-sudah seringkali terjadi umat Islam merintis jalan dan berkorban, seperti kebangkitan nasional tersebut tadi, namun golongan lain dengan pengalaman lebih baik dalam pendidikan dan kehidupan modern yang meneruskan dan memberi penyelesaian-penyelesaian.

Dikatakan bahwa kelemahan itu tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri, sebab sebagian adalah akibat adanya faktor situasi kolonial pada saat itu. Berkaitan dengan ini saya ingat bahwa dulu pada permulaan bangkitnya Orde Baru sering terdengar ejekan kepada umat Islam sebagai kelompok mayoritas (*numerical majority*) tetapi minoritas teknis (*technical minority*). Ejekan itu merupakan suatu ironi, sebab ketidakmampuan teknis

umat Islam adalah justru akibat suatu aset positif dalam perjuangan nasional di zaman penjajahan, yaitu sikap non-kooperatif dengan kaum kolonial, termasuk dalam hal pendidikan. Sebaliknya untuk generasi zaman kolonial kebanggaan memiliki kecakapan teknis yang tinggi adalah sesungguhnya suatu ironi; sebab kecakapan itu didapat berkat “kompromi” terhadap “kultur kolonial” dalam bentuk sikap menerima pendidikan yang mereka sediakan. Kemampuan teknis itu terutama adalah fungsi dari adanya pengalaman pendidikan modern itu. Karena segi-segi teknis kehidupan zaman sekarang diukur dengan ketentuan-ketentuan teknis modern. Pengetahuan teknis modern itu pada mulanya asing bagi umat Islam, karena kenyataannya memang datang dari bangsa-bangsa Barat bukan Muslim.

Sudah tentu terdapat orang-orang Islam yang berhasil mengecap pendidikan modern sejak zaman kolonial. Orang-orang ini mempunyai jasanya sendiri yang tidak bisa diremehkan untuk perkembangan cita-cita umat Islam Indonesia. Khususnya mereka berjasa karena percobaan mereka menawarkan perumusan kembali ide-ide kemasyarakatan dan politik Islam dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan zaman. Namun mereka ini juga tak lepas dari kekurangan-kekurangan. Antara lain, seperti dikatakan oleh Deliar Noer, bahwa dalam percobaan reformulasi ide-ide itu mereka jatuh ke dalam semangat apologia yang defensif sifatnya.

Salah satu apologia yang paling berat ialah percobaan mereka untuk mengajukan Islam dan memandangnya secara langsung sebagai sebuah ideologi politik seperti halnya dan sebanding dengan ideologi-ideologi politik yang ada di dunia ini. Memang terdapat kontroversi mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “ideologi”: **apakah agama termasuk ideologi atau tidak**, khususnya berkenaan dengan agama Islam. Saya berpendapat bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi, meskipun ia bisa malah seharusnya berfungsi sebagai sumber idiologi para pemeluknya. Tetapi Islam sendiri terbebas dari keterbatasan-keterbatasan sebuah ideologi yang sangat memperhatikan konteks ruang dan waktu itu. Meskipun menyangkut persoalan yang luas dan tidak sederhana,

dan mempunyai makna positifnya tersendiri sebagai suatu bentuk sumbangan kepada kebangkitan Islam sekitar Perang Dunia Kedua, namun pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi bisa berakibat merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada. Seperti dikatakan oleh Ali Merad:

*The ideologisation process of religion in the Muslim world takes place in a wider context, which has allowed contemporary Muslim thought to make decisive shifts from traditional theological field to the sociological one, and to formulate the content of 'Islam' in terms of norms and values of socio-political order. As a result this may relativise Islam, if not relegate it to the background, or to definitely conceal the specific values of the religion.*¹

Saya rasa Ali Merad benar dalam pernyataannya itu.

Menarik sekali memperhatikan bahwa perkembangan pemikiran tentang Islam di Indonesia tampaknya sedang membentuk suatu lingkaran penuh. Islam datang ke bumi Indonesia, seperti dikatakan oleh para ahli sejarah, sebagai agama yang banyak diliputi oleh ajaran-ajaran mistik. Kemudian semakin banyaknya kaum Muslim Indonesia yang mampu pergi ke Timur Tengah, antara lain berkat digunakannya mesin uap untuk pelayaran, telah mendorong adanya perkembangan baru yang merupakan suatu kemajuan bagi kaum Muslim Indonesia, berupa semakin ditinggalkannya orientasi mistik (tasawuf), dan digantikan dengan orientasi fiqh atau hukum syariat yang lebih murni. Proses selanjutnya terjadi ketika terdapat jumlah yang cukup orang-orang Islam yang sempat memperoleh pendidikan modern, kemudian mereka ini maju dengan gagasan-gagasan yang lebih segar, khususnya dalam bentuk pandangan terhadap Islam sebagai norma-norma dan nilai-nilai susunan

¹ Lihat, dalam Alexander S. Cudsi dan Ali E. Hillal Dessouki, (penyunting), *Islam and Power* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1981), h. 37.

sosio-politik tersebut di atas. Golongan ini umumnya terdiri dari kaum intelektual modern, namun awam dalam agama, dalam arti bahwa mereka tidak memiliki latihan formal yang mendalam di bidang ilmu-ilmu tradisional Islam. Dengan meminjam jargon yang banyak dikenal, mereka ini adalah para intelektual-bukan-ulama, sebagaimana tokoh-tokoh golongan terdahulu adalah para ulama-bukan-intelektual. Kemudian perkembangan terakhir ialah tumbuhnya suatu kelompok baru lagi yang sekalipun tampaknya masih sangat bersifat permulaan namun menunjukkan tanda-tanda akan menawarkan sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Mereka ini sangat kritis terhadap pandangan Islam sebagai ideologi sosio-politik dan mencoba menghayatinya sebagai sumber inspirasi yang lebih tinggi. Mungkin yang paling diperlukan oleh kelompok ini ialah pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama, penghargaan yang lebih baik namun tetap kritis kepada warisan kultural umat, dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat.

Orde Baru dan Islam

Berkenaan dengan pertanyaan bagaimana penilaian terhadap gejala kemasyarakatan Indonesia di masa Orde Baru yang baru beberapa bulan berakhir itu dari sudut pandangan Islam, barangkali ada baiknya ditegaskan bahwa penilaian kepada suatu perkembangan sosial tidak bisa dilakukan dalam ukuran-ukuran kemutlakan. Perkembangan itu harus dilihat dalam kaitan nisbinya dengan hal-hal lain. Sayangnya, hal-hal itu, sepanjang persoalan sosial-politik ada dalam jumlah hampir tak terbatas sehingga sulit sekali, jika tidak mustahil, untuk memperhitungkan keseluruhannya. Ini menyebabkan hampir tidak mungkinnya membuat penilaian yang tepat benar atas suatu perkembangan sosial-politik.

Walau begitu, sesuai dengan ide kenisbian tersebut, dan sebagai dasar untuk mengembangkan peran-serta kaum Muslim di era

reformasi ini, kiranya cukup beralasan jika kita katakan bahwa di masa Orde Baru menunjukkan banyak segi yang lebih baik untuk kaum Muslim dibanding dengan Orde Lama. Mungkin hal ini mengandung logikanya sendiri, mengingat bahwa dari awal perkembangannya, Orde Baru mendapat dukungan paling kuat dari kelompok-kelompok beraspirasi politik Islam ketimbang kelompok-kelompok lain. Tentu saja hal ini diingatkan tanpa mengurangi peranan kelompok-kelompok lain itu.

Segi-segi kebaikan yang nisbi tersebut secara singkatnya ter-cennin dalam banyak bentuk perkembangan sosial yang biasa ditunjuk sebagai gejala kebangkitan Islam di Indonesia. Meskipun gejala itu mempunyai aspek global (terjadi hampir di seluruh dunia Islam), namun jelas bahwa hal itu dimungkinkan di Indonesia oleh banyak sekali faktor yang khusus Indonesia, dan dalam hal ini — kebetulan atau tidak — faktor-faktor khusus Orde Baru pada masa itu. Hal ini pun dikemukakan tanpa mengingkari adanya beberapa bentuk pertumbuhan positif yang merupakan kelanjutan pertumbuhan serupa dalam Orde Lama, seperti “mobilitas vertikal” agama Islam yang mengarah kepada perkembangan itu di masa Orde Baru tampak sangat pesat, maka itu terjadi antara lain akibat dihilangkannya berbagai hambatan sosial-politik, khususnya dalam bentuk pelarangan PKI dengan ateismenya.

Dinamika masyarakat, termasuk masyarakat Islam, menyebabkan tidak mungkin dihentikan pada tahap perkembangan sosial tertentu, betapa pun dekatnya tahap itu dengan cita-cita semula. Sebab cita-cita itu sendiri juga berkembang. Karena itu cukup tak masuk akal untuk menilai bahwa struktur kehidupan politik bangsa kita sekarang adalah klimaks dari perjuangan umat Islam Indonesia selama ini. Islam adalah agama kemanusiaan (fitrah), yang membuat cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal. Cita-cita itu tidak akan berhenti pada satu titik tertentu, sebab salah satu aspek terpenting kemanusiaan ialah perkembangan. Karena sifat perkembangan itu, maka tidak akan ada penyelesaian masalah kemanusiaan sekali untuk selamanya.

Setiap pengakuan akan suatu bentuk penyelesaian final akan melawan natur kemanusiaan, dan jika seandainya finalitas itu betul-betul tercapai, maka yang sebenarnya terjadi adalah satu dari dua: kesempurnaan manusia di dunia ini (hal mana menurut Islam sendiri adalah mustahil), atau musnahnya kemanusiaan itu. Eskatologi Islam tentang hari kiamat dapat diartikan sebagai mengisyaratkan hal terakhir itu.

Islam dan Masalah Kemajemukan Masyarakat

Karena cita-cita keislaman yang fitri itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman di Indonesia juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya. Pernyataan ini memang mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Saya meyakini betul bahwa pandangan itu merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Berdasarkan hal itu maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.

Pikiran bahwa yang dikehendaki Islam ialah suatu sistem yang menguntungkan semua orang termasuk mereka bukan Muslim — adalah sejalan dengan watak inklusif Islam. Dan pandangan itu telah memperoleh dukungannya dalam sejarah Islam sendiri. Salah satu yang amat menarik tentang Islam dalam masa-masa awal perkembangannya ialah kemampuannya dengan kecepatan yang mengagumkan untuk mengembangkan pengaruh sosial-politik ke wilayah-wilayah yang waktu itu merupakan pusat-pusat peradaban manusia. Keterangan yang biasa diberikan tetapi bernada simplistik ialah bahwa kemampuan itu terjadi karena kefanatikan orang-orang Arab untuk menyebarkan agama mereka, digabung dengan motif yang amat kuat untuk memperoleh harta rampasan,

dan didukung oleh keunggulan strategi militer dalam bentuk kecakapan menggunakan medan padang pasir. Tetapi keterangan ini mengingkari kenyataan bahwa agama mereka mengajarkan, dan mereka sendiri dengan taat melaksanakan, prinsip tidak diperkenankannya paksaan dalam menyebarkan keyakinan; bahwa Umar ibn al-Khaththab, Khalifah kedua, membagi-bagikan harta rampasan berupa tanah-tanah pertanian yang merupakan alat produksi utama di daerah-daerah yang dibuka itu justru tidak kepada kaum Muslim Arab itu sendiri, melainkan kepada rakyat kecil setempat; bahwa orang-orang Arab itu bukanlah satu-satunya yang ahli tentang medan perang padang pasir — lagi pula tidak hanya negeri mereka saja yang terdiri dari gurun — sedangkan keahlian teori kemiliteran mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang dipunyai oleh bangsa-bangsa besar sekitarnya yang kelak mereka taklukkan itu, yaitu Persia dan Romawi Timur (Byzantium), dua kekuatan besar (*superpower*) saat itu.

Keterangan lain yang semakin banyak mendapat dukungan tinjauan ilmiah ialah bahwa orang-orang Muslim Arab itu memperoleh keberhasilan gemilang karena mereka menawarkan sistem alternatif kepada rakyat daerah-daerah pengaruhnya itu yang bisa membawa kebaikan bagi semua pihak. Kebaikan bersama itu tidak pernah terjadi pada mereka sebelumnya, sekalipun daerah-daerah itu kekuasaannya berada pada orang-orang yang sebangsa ataupun seagama dengan mereka sendiri. Itu semua menyebabkan bahwa kedatangan orang-orang Muslim di mana-mana disambut gembira oleh rakyat sebagai para penyelamat dan pembebas.

Sistem alternatif yang dimaksud itu tercermin dalam berbagai konsep kehidupan yang semula tidak pernah dikenal di daerah-daerah tersebut. Untuk menyebutkan beberapa saja, konsep-konsep itu misalnya prinsip toleransi agama dan kebebasan beribadat, penghargaan kepada warisan budaya kelompok-kelompok lain, penghargaan kepada hak-hak sah pribadi-pribadi, sikap yang lebih positif kepada ilmu pengetahuan, cara hidup yang lebih bersih dari takhayul, dan seterusnya. Konsep-konsep demikian pada saat itu

tampaknya tidak terdapat di bagian lain mana pun. Kemudian konsep-konsep itu sedikit demi sedikit merembes ke tempat-tempat lain, termasuk Eropa. Di Eropa konsep-konsep itu menjadi bagian penting tema pemikiran kebangkitan kembali (*Renaissance*) bangsa-bangsa di sana setelah mereka berkesempatan membuat kontak langsung dengan dunia Muslim.

Berbeda dengan prasangka banyak orang sampai dengan saat sebelum terakhir ini, orang-orang Arab itu tidak pernah memaksakan suatu sistem monolitik kepada rakyat. Masing-masing kelompok dilindungi dengan kuat, dan diberi hak untuk menempuh cara hidup seperti yang mereka pilih dan tetapkan sendiri. Memang pluralisme sosial dunia Islam itu tidak sepenuhnya bisa bertahan terhadap perkembangan sejarah (seperti timbulnya gerakan *syu'ūbiyah*, semacam nasionalisme pada abad pertengahan Islam dan yang diterjemahkan ke dalam bentuk gerakan-gerakan keagamaan yang eksklusivistis; *syu'ūbiyah* itu timbul terutama karena inspirasi dari Persianisme dengan pujangga Firdausi sebagai tokohnya). Tetapi prinsip pluralisme itu sendiri tetap bertahan secara sehat, dan sampai batas-batas tertentu tetap menarik, malah mengagumkan. Sampai saat sekarang pun kita masih bisa menyaksikan secara nyata kelanjutan pluralisme yang harmonis itu. Hanya setelah kedatangan kaum imperialis Barat yang tamak itu maka keserasian majemuk dunia Islam tersebut terganggu. Kaum imperialis pergi dengan meninggalkan berbagai tragedi, khususnya tragedi di Palestina dan Libanon saat ini.²

Berdasarkan pengalaman Islam dalam sejarah tersebut, kiranya dapat ditegaskan bahwa agama itu dalam keasliannya tidak memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif. Gejala eksklusivisme pada sementara orang-orang Islam saat ini dapat dicari keterangannya dalam berbagai kaitan nisbinya,

² Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut persoalan penting sejarah ini, buku Marshall GS Hodgson, *The Venture of Islam*, terbitan Universitas Chicago, akan sangat menolong.

dan jelas bukan sesuatu yang menjadi genius agama Islam. Dalam hal ini kita tidak bisa meremehkan psikologi sebagian kaum Muslim akibat pengalaman hidup dan berjuang melawan kaum imperialis. Pengalaman serupa tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, tetapi juga oleh kelompok-kelompok sosial politik lain termasuk mereka dengan latar belakang keagamaan dan kebudayaan yang sama dengan kaum imperialis.

Pancasila dan UUD 45 untuk Indonesia

Dan pandangan bahwa Islam menghendaki para pengikutnya untuk berjuang bagi kebaikan universal (sebagai rahmat untuk sekalian alam), dan kembali ke keadaan nyata Indonesia, maka sudah jelas bahwa sistem yang sejauh ini membuktikan dirinya mampu menjamin kebaikan konstitusional bagi keseluruhan bangsa kita ialah sistem yang telah kita sepakati bersama, yaitu pokok-pokok yang terkenal dengan Pancasila menurut semangat UUD 45. (Ucapan yang hampir stereotipikal ini terpaksa dikemukakan karena pembahasan kita di sini menyentuh suatu persoalan pokok yang untuk sebagian masyarakat belum dianggap selesai benar). Kaum Muslim Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 45 itu atas setidak-tidaknya dua pertimbangan: *pertama*, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam; *kedua*, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antarberbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 45 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dibandingkan, sekalipun tidak bisa disamakan, dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal sebagai Konstitusi Madinah) bagi umat Islam kota Yatsrib pada masa-masa awal setelah Hijrah Nabi. Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Yatsrib (Madinah) di bawah

pimpinan Rasulullah *saw* dengan berbagai kelompok bukan Muslim kota itu untuk membangun masyarakat politik bersama.

Bunyi naskah Konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam Konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antargolongan, dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu antisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.

Sebanding dengan sikap kaum Muslim Indonesia dalam menerima Pancasila dan UUD 45, orang-orang Muslim pimpinan Rasulullah *saw* itu menerima Konstitusi Madinah adalah juga atas pertimbangan nilai-nilainya yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antargolongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Demikian pula sama halnya dengan umat Islam Indonesia yang tidak memandang Pancasila dan UUD 45 itu sebagai alternatif terhadap agama Islam, Rasulullah *saw* dan para pengikut beliau itu pun tidak pernah terbetik dalam pikiran mereka bahwa Konstitusi Madinah itu menjadi alternatif bagi agama baru mereka.

Karena berbagai langkah politik yang ditempuh Rasulullah itu, maka Hijrah ke Madinah sering secara benar ditunjuk sebagai titik-permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam. Segi politik organisasi itu mendapatkan perkembangan barunya berupa pengukuhan oleh Umar ibn al-Khaththab, Khalifah kedua, terlambangkan dalam kesadarannya bahwa ia sesungguhnya adalah “Komandan Orang-orang Beriman” (*Amīr al-Mu’minīn*). Perkembangan selanjutnya terjadi ketika kekhalifahan pindah ke tangan Bani Umayyah dan mereka menjadikan Damaskus sebagai pusat kekuasaan politik. Tetapi para sarjana, Muslim maupun bukan, bersepakat bahwa kekuasaan politik yang berpusat di Damaskus itu sudah mulai memasukkan unsur semacam nasionalisme

Arab. Sejak itu kesatuan politik orang-orang Muslim mulai dikenal sebagai negara yang sebutannya selalu dikaitkan kepada dinasti yang berkuasa (misalnya, “Daulah Umawiyah” — Negara Umayyah, “Daulah Abasiyah” — Negara Abasiyah, dan seterusnya).

Berkaitan dengan ini kita harus tetap ingat bahwa hijrah Rasulullah *saw* ke Madinah itu bukanlah atas kehendak sendiri, sekalipun pelaksanaannya didukung oleh petunjuk Tuhan. Beliau pindah ke Madinah atas undangan, malah permintaan, kelompok-kelompok terpenting penduduk Madinah yang kemudian mereka itu bersama kelompok-kelompok lainnya bersepakat untuk menjadikan Rasulullah *saw* pemimpin tertinggi mereka. Jadi Rasulullah *saw* tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum Muslim. Justru yang ditangani pertama sebagai langkah politik ialah mengatur kerja sama yang baik antarberbagai golongan di kota itu dalam semangat kemajemukan. Kehidupan antargolongan itu diatur atas dasar kepentingan bersama dan secara demokratis, sebagaimana Rasulullah *saw* sendiri menjadi pemimpin tertinggi adalah karena proses yang demokratis.

Pluralisme Madinah di bawah pimpinan Rasulullah *saw* dan berdasarkan Konstitusinya itu berjalan secara baik dan lancar, dengan tiap-tiap kelompok mengambil bagian kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing, termasuk pertahanan terhadap musuh dari luar, sampai dengan terjadinya pengkhianatan demi pengkhianatan yang fatal oleh beberapa kelompok orang-orang Yahudi Madinah penandatanganan Konstitusi. Karena pengkhianatan itu sangat membahayakan tatanan sosial yang sedang dibangun, maka para pelakunya mendapat hukuman setimpal: sebagian dipersilakan dengan leluasa meninggalkan kota, sebagian lagi diusir dengan paksa, dan sebagian lagi kekuatan militernya dihancurkan sama sekali. Maka sejak itu masyarakat politik Madinah berkembang ke arah yang lebih homogen. Homogenitas sosial itu kemudian diperkuat oleh kebijaksanaan Umar ibn al-Khaththab, tidak saja untuk kota Madinah, tetapi juga untuk seluruh Jazirah Arabia. Tampak Umar berpendapat diperlukannya semacam *home*

base yang tangguh untuk melancarkan operasi-operasi pembebasan lebih lanjut.

Sekalipun setelah terjadinya peristiwa-peristiwa pengkhianatan Yahudi tersebut resminya Konstitusi Madinah itu sudah tidak berlaku lagi namun prinsip-prinsipnya tetap sah dan diikuti di tempat-tempat lain. Kita juga mengajukan hipotesa-hipotesa tentang apa yang sekiranya bakal terjadi seandainya tidak pernah timbul pengkhianatan-pengkhianatan tersebut. Tapi satu hal sudah jelas, seperti telah dikatakan tadi, yaitu bahwa ketika orang-orang Arab itu melakukan gerakan-gerakan pembebasan ke daerah-daerah luar Arabia dan mendapatkan masyarakat yang beraneka ragam, maka yang pertama kali mereka lakukan ialah mengatur hubungan antar-kelompok itu dengan mencontohkan praktik dan kebijaksanaan Rasulullah *saw* di Madinah dahulu. Inilah penjelasannya, mengapa negeri-negeri Muslim itu sampai saat ini pun umumnya terdiri dari masyarakat majemuk yang harmonis, sekalipun terjadi berbagai ironi seperti tragedi-tragedi “Israel” dan Libanon sebagaimana disinggung di muka.

Sudah kita katakan bahwa tragedi-tragedi di Timur Tengah itu, khususnya yang terwujud dalam bentuk negara “Israel”, adalah hasil kejahatan imperialisme Barat. Dan kita katakan bahwa kejadian-kejadian itu ironis, karena justru orang-orang Ahli Kitab (*ahl al-Kitāb*), dengan sendirinya termasuk orang-orang Yahudi, adalah golongan yang paling dilindungi dalam Islam. Golongan Yahudi khususnya berutang budi besar sekali kepada Islam untuk sebagian besar survival mereka. Bahkan menurut para ahli keyahudian, seperti Abraham S. Halkin, Frederick M. Scweitzer, dan Max I. Dimont, di bawah Islam itulah kebudayaan Yahudi mengalami zaman keemasannya yang katanya sampai kini belum tertandingi. Sebagai gambaran bagaimana keadaan orang-orang Yahudi di masa kejayaan Islam itu, kutipan dari Max I. Dimont dalam bukunya *Jews, God, and History* di bawah bab “Mohammed, Allah, and Jehovah”, berbunyi demikian:

*The improbable but true tale of camel driver's establishment of a world empire in the name of Allah, where in the Jews rose to their Golden age of creativity, only to be plunged into a dark age with the eclipse of the crescent and the ascent of the cross.*³

Pikiran-pikiran besar para sarjana mereka sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Islam, sehingga filsafat mereka pun disusun dengan mengikuti tradisi ilmu kalam Islam.⁴ Karena itu berdirinya “Israel” relevan terhadap sejarah di Timur Tengah hanya jika dikaitkan dengan kejahatan imperialisme Barat saja!

Berdasarkan banyak bukti dalam sejarah itu, maka tidak begitu beralasanlah bagi sementara golongan minoritas bukan Islam (jika ada) untuk mengkhawatirkan Islam sebagai hendak memperjuangkan suatu bentuk kekuasaan eksklusif. Sama tidak beralasannya bagi sementara golongan Islam sendiri (jika ada) yang mengingatkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif. Memang harus diakui bahwa definisi hubungan antara kaum Muslim dengan golongan-golongan lain bisa cukup rumit. Bahkan dengan golongan Yahudi dan Kristen pun, dua agama paling dekat dengan Islam, al-Qur'an mencatat adanya bentuk-bentuk hubungan yang tidak sederhana. Islam menyokong paham Ketuhanan agama Yahudi yang dinilainya lebih setia kepada prinsip monoteisme Nabi Ibrahim, tetapi menyalahkan karena mengingkari kerasulan Nabi Isa al-Masih (Yesus Kristus), dan al-Qur'an mengecam tingkah laku orang-orang Yahudi itu sebagai congkak dan sangat memusuhi orang-orang beriman (Q 5:82). Al-Qur'an dengan amat keras menolak ketuhanan Isa al-Masih sebagaimana dianut oleh orang-orang Kristen, sehingga RE Peters dalam bukunya *Children of Abraham*, memandang Nabi Muhammad sebagai “seorang Israeli”, yakni, “fundamentalis” — karena Nabi Muhammad dengan penuh

³ *The American Library*, New York, 1962, h. 183.

⁴ Lih. Harry Austryn Wolfson, *Repercussions of the Kalam in the Jewish Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1979).

semangat mengajak semua pihak untuk kembali ke ajaran pokok Nabi Ibrahim yang selain dianggap bapak paham Ketuhanan Yang Mahaesa atau monoteisme juga dipandang sebagai leluhur bangsa Yahudi atau Israel, di samping bangsa Arab. Tetapi ia memuji para pengikut Kristus sebagai golongan yang paling simpatik kepada orang-orang beriman “*karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, lagi pula mereka tidak sombong,*” (Q 5:82), dan bahwa Tuhan “*menumbuhkan dalam hati mereka yang mengikuti (Yesus) itu rasa santun dan kasih sayang,*” (Q 57:27).

Tetapi, betapa pun penilaian kepada segi-segi fisik agama-agama tersebut, namun jelas bahwa al-Qur’an mengakui hak hidup golongan-golongan Yahudi dan Kristen itu dan sudah pula dipraktikkan sejak dari masa Konstitusi Madinah di atas sampai masa sekarang — sebagaimana secara implisit diakuinya pula hak hidup agama-agama lain sepanjang dapat diajak maju kepada suatu bentuk kesepakatan sosial-politik bersama. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Tuhan tidak melewatkan satu bangsa atau umat pun tanpa seorang rasul dikirim kepada mereka untuk memberi pengajaran atau agama (Q 35:24), dan bahwa riwayat rasul-rasul itu sebagian diceritakan dalam Kitab Suci dan sebagian tidak (Q 40:78). Dengan kata lain al-Qur’an mengisyaratkan adanya agama Tuhan pada setiap rumpun manusia (umat) di masa lalu yang harus dihormati sebagaimana sikap Islam kepada Ahli Kitab. Itulah sebabnya maka konsep tentang siapa Ahli Kitab pernah dalam sejarah Islam untuk diperluas tidak hanya meliputi orang-orang Yahudi dan Kristen saja, tetapi juga orang-orang Zoroaster, Hindu, dan Budha.

Berdasarkan pembahasan itu semua maka dapatlah disimpulkan dengan mantap bahwa sikap umat Islam Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 45 dapat dipertanggung-jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Dari sudut pandangan itu pula kita harus menilai kesungguhan para tokoh umat Islam yang sering menegaskan bahwa antara Islam serta kaum Muslim Indonesia dan Pancasila serta UUD 45 tidak ada masalah.

Kesulitan-kesulitan sosial-politik yang datang dari kalangan Muslim tidak harus selalu dilihat dalam kerangka hubungannya dengan Pancasila atau UUD 45, melainkan sebaiknya juga dilihat kaitan-kaitan nisbinya saja serta dicarikan pemecahannya secara pragmatis. (Misalnya, dipertimbangkan bahwa kesulitan ini sering datang dari kalangan Islam karena memang sebagian besar rakyat beragama Islam, dan kesulitan yang sama atau sebanding juga datang dari golongan lain bukan Muslim). Kecenderungan untuk secara gampang mencari keterangan atas suatu kesulitan sosial-politik yang datang dari suatu kelompok dengan stereotipikal mengaitkannya kepada hal-hal yang prinsipil seperti Pancasila dan UUD 45 adalah satu petunjuk kemampuan berpikir yang sederhana dan ketidakberanian menghadapi kenyataan persoalan. Atau mungkin juga hal itu dilakukan karena mengharap keuntungan politik dengan mudah. Tetapi dengan akibat kerusakan menjadi semakin parah dan persoalan yang sebenarnya tidak pernah terselesaikan.

Demokrasi sebagai Prinsip dan Aturan Permainan

Tadi telah dikemukakan bahwa sekalipun Islam bukanlah suatu ideologi sosial-politik, tetapi ia bisa, malah terus, menjadi sumber ideologi tertentu bagi para pemeluknya. Dengan kata lain, atas dasar pertimbangan ajaran agamanya itulah seorang Muslim memilih suatu ideologi. Saya rasa ini adalah wajar dan sudah semestinya. Dan hal ini sudah tentu berlaku tidak hanya bagi pemeluk-pemeluk Islam, tetapi juga pemeluk-pemeluk agama lain, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan penting dalam berbagai hal khusus agama-agama itu. Tanpa sikap demikian maka seorang pemeluk berarti telah mengalami kepribadian yang pecah.

Maka seseorang atau sekelompok Muslim menetapkan untuk memilih suatu ideologi karena ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa ideologi itu didukung oleh keyakinan dan ajaran agamanya. Tetapi ia harus selalu waspada untuk tidak

menganggap ideologi pilihannya tersebut sebagai Islam itu sendiri. Sebab kita sudah mengetahui bahwa suatu ideologi terbentuk dengan sangat terpengaruh oleh keadaan ruang dan waktu. Dan memandang suatu ideologi serupa itu, betapa pun cermatnya ia dipertimbangkan, sebagai sama dengan agama itu sendiri, akan berarti menisbikan agama. Hal ini juga telah disinggung di muka.

Bertitik-tolak dari pandangan dasar ini, maka dapat diduga kemungkinan adanya perbedaan dalam ideologi politik di antara berbagai individu atau kelompok Muslim. Dan hal ini tidaklah perlu menimbulkan kekhawatiran, sebab sampai batas-batas tertentu yang cukup luas diizinkan oleh agama. Kita ingat sabda Nabi bahwa perbedaan di antara umat adalah rahmat. Tetapi pada waktu yang sama juga sudah tentu dibenarkan adanya harapan bahwa di antara ideologi-ideologi kalangan Muslim itu terdapat titik-titik persamaan. Tanpa hal terakhir ini, maka berarti bahwa ajaran-ajaran Islam bagi suatu kelompok atau lainnya dari kalangan Muslim itu tidak mempunyai makna apa-apa, dan karenanya terdapat kemungkinan adanya semacam disorientasi. Sebab, sekalipun terdapat ruang untuk memilih suatu ideologi yang relevan untuk seseorang atau sekelompok Muslim sesuai dengan kaitan ruang dan waktu — dan saya rasa inilah salah satu implikasi prinsip *ijtihad* — namun jelas seorang Muslim tidak dibenarkan memilih suatu ideologi yang terang-terangan bertentangan dengan jiwa Islam, seperti misalnya sistem mendukung kezaliman. Keabsahan ideologi itu diperoleh hanya jika penganutnya mampu membuktikan bahwa ia bisa mendapat dukungan prinsip-prinsip ajaran agamanya.

Dengan cara di atas itulah kita dapat mengerti mengapa senantiasa ada kemungkinan berbagai kelompok kaum Muslim menganut ideologi sosial-politik yang berbeda-beda. Di Indonesia ini misalnya, Masyumi, khususnya partai itu sebelum 1955 (pemula pertama), dikenal sebagai partai politik yang gigih menganut ideologi demokrasi. Partai-partai Islam lain pun juga menyatakan sebagai menganut demokrasi. Tetapi Masyumi mempunyai kelebihan atas partai-partai Islam tersebut, karena

tokoh-tokohnya sanggup mengartikulasikan ide-ide demokrasi dengan cara yang sangat baik. Lebih dari itu, Masyumi, berkat pendidikan para anggota pucuk pimpinannya (yakni, pendidikan modern [Belanda]), artikulasi ide-idennya itu begitu rupa sehingga memberi kesan kuat bahwa partai itu, lewat pucuk pimpinannya, secara langsung menganut ide demokrasi Barat yang liberal. Kesan itu tercermin, misalnya, pada tuduhan kepada partai itu oleh lawan-lawannya, seperti Bung Karno dan PKI, bahwa ia adalah “kampiun liberalisme” di Indonesia. Karena orientasi itu, maka tidak mengherankan, malah sepenuhnya bisa dibenarkan, bahwa Masyumi mendapatkan dirinya berada pada pandangan ideologi yang hampir sama, kalau tidak sama benar, dengan partai-partai lain yang bukan Islam tetapi pimpinannya mempunyai latar belakang latihan dan pendidikan yang sama dengan tokoh-tokoh Masyumi, yaitu Partai Sosialis, Partai Kristen, dan Partai Katolik. Dengan para tokoh partai-partai bukan Islam inilah, ditambah unsur-unsur perorangan partai-partai lainnya, Masyumi pernah menggalang semacam front bersama menghadapi kecenderungan anti-demokrasi Bung Karno dengan mendirikan Liga Demokrasi. Selain komitmennya kepada demokrasi yang cukup menarik itu, pengalaman Masyumi menunjukkan satu bukti di tanah air sendiri dalam sejarah yang tidak terlalu jauh, bahwa selalu terdapat kemungkinan suatu kelompok Muslim menganut ideologi sosial-politik modern yang inklusif sifatnya, dan yang karenanya memungkinkan tumbuhnya keserasian plural, suatu bentuk tatanan yang menjadi tuntutan situasi Indonesia. Di sini kita tidak membicarakan citra Masyumi setelah pemilu 1955, khususnya karena peranannya dalam Konstituante. Juga tidak kita bicarakan alienasi Masyumi dari partai-partai Islam lainnya — NU, PSII, dan Perti — yang mengucilkan Masyumi dan membentuk Liga Muslim. Tidak pula kita bicarakan keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam pergolakan kedaerahan yang sangat membahayakan Republik.

Tahap perkembangan Indonesia sekarang, meski secara politik masih dianggap sedikit bermasalah, tapi merupakan titik penting untuk Indonesia mendatang. Tahap ini disebut titik penting karena pada saat inilah kita sebagai warga negara baru pertama kalinya diikutsertakan untuk merumuskan pencarian format politik bangsa ini. Tentu saja kita memilih demokrasi sebagai ideologi politik. Dan kita memilih demokrasi sebagai ideologi tidak hanya karena pertimbangan prinsipil — yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu menurut kita dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran-ajaran Islam — tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka. Aturan permainan terbuka itu kita perlukan agar dalam sistem politik kita terwujud secara *built-in* suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan koreksi atas kesalahan-kesalahan pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional. Sebab, sekalipun kita telah menyatakan akan dengan sepenuh hati berpegang pada filsafat kenegaraan dan konstitusi kita, namun kita juga menyadari bahwa pegangan-pegangan itu berada dalam rumusan-rumusan garis besar. Rumusan-rumusan itu, tanpa perincian segi-segi pelaksanaannya, akan tidak mempunyai makna apa-apa. Dan pembuatan perincian segi pelaksanaan itu akan menyangkut berbagai kelompok paham dan kepentingan dalam kemajemukan masyarakat, serta akan terkait erat dengan pertimbangan kenyataan sehari-hari. Karena itu ia akan berkembang secara dinamis, dan karenanya pula memerlukan pengawasan yang lestari dengan mengikutsertakan semua warga negara dalam keterbukaannya sistem demokrasi. Maka dengan sendirinya bergandengan dengan demokrasi itu adalah prinsip pluralisme sosial.

Di depan telah diajukan argumentasi bahwa salah satu inti kemanusiaan ialah perkembangan. Hal ini membuat tidak adanya penyelesaian sekali untuk selamanya bagi masalah-masalah kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan demokrasi, sebab demokrasi adalah kemanusiaan. Karena itu sebaiknya kita

tidak memahami demokrasi sebagai sesuatu yang statis, yang terletak seolah-olah pada suatu tempat di depan kita dan kita menuju kepadanya. Demokrasi lebih baik kita pahami sebagai sesuatu yang dinamis, yang menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses progresif mengikuti suatu garis kontinum. Jadi antara keadaan masyarakat kita sekarang ini (*das Sein*) dan keadaan demokratis yang kita kehendaki (*das Sollen*) tidak bisa kita ukur jarak ruang atau waktunya. Kita akan mengatakan suatu masyarakat tidak demokratis jika tidak ada *proses demokratisasi*. Sebaliknya, cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis, jika terdapat proses demokratisasi yang lestari dan konsisten. Dan proses itu bisa diukur atau diketahui dalam beberapa “*check-list*”, terutama bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata, dan seterusnya. Karena itu demokrasi merupakan hasil perkembangan masyarakat yang bertahap. Tetapi percepatan proses demokratisasi juga sangat tergantung kepada kemauan dan keputusan politik pimpinan negara dan kaum terpelajar masyarakat. India, misalnya, bisa disebutkan sebagai contoh negara dengan proses demokratisasi yang dipercepat oleh kemauan dan keputusan politik pihak pimpinan. Merupakan satu negara yang sering disebut sebagai demokrasi terbesar di dunia, India melaksanakan suatu sistem politik yang relatif sangat maju dan terbuka, dan kemajuan serta keterbukaan sistem politiknya seakan-akan mengingkari kenyataan bahwa masyarakat India masih sangat terbelakang. Ini menunjukkan kemungkinannya bagi suatu negara (berkembang, seperti Indonesia) untuk memiliki serta mengembangkan komitmen yang kuat kepadanya dan melaksanakannya dalam pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan politik. Persoalannya ialah, bagaimana mewujudkan lapisan pimpinan dengan kesadaran tinggi itu dan, lebih penting lagi, bagaimana memilih mereka untuk menjadi pelaksana-pelaksana pemerintahan.

Hak dan Kewajiban Umat Islam

Membandingkan Pancasila/UUD 45 Indonesia dengan Konstitusi Madinah tidak hanya mengisyaratkan kesejajaran pola penerimaan kelompok-kelompok bersangkutan akan nilai-nilai kesepakatan itu. Tetapi juga mengimplikasikan adanya hak dan kewajiban yang sama pada kelompok-kelompok bersangkutan yang bisa disejajarkan.

Terhadap Konstitusi Madinah, Rasulullah *saw* dan umat Islam di bawah pimpinan beliau berkewajiban membela keutuhan dan perincian pelaksanaannya dari setiap penyelewangan dan pengkhianatan. Kaum Muslim di Madinah telah menunaikan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya ketika mereka harus menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan kelompok-kelompok Yahudi dari Bani Qainuqa' dan Bani Quraizhah. Kemudian kaum Muslim tetap berpegang pada nilai-nilai serta semangat konstitusi itu, dan dengan setia melaksanakannya ketika mereka mengembangkan sayap politik mereka sesudah wafat Rasulullah *saw*.

Maka sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh kaum Muslim Madinah terhadap konstitusi mereka itu, umat Islam Indonesia berkewajiban membela Pancasila baik sebagai keutuhan maupun dalam perincian pelaksanaannya, serta berkewajiban pula mempertahankan nilai kesepakatan itu dari setiap bentuk pengkhianatan.

Salah satu konsekuensi penting dari Pancasila, seperti juga Konstitusi Madinah, ialah adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam kehidupan kita. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing kita mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemandirian kepada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat kolektif. Dalam al-Qur'an, prinsip kebebasan beragama itu dengan tegas dihubungkan dengan sikap tanpa emosi,

pertimbangan akal sehat, dan kemantapan kepada diri sendiri tersebut, karena percaya akan adanya kejelasan kriterium mana yang benar dan mana pula yang palsu: “*Tidak ada paksaan dalam agama; sungguh telah jelas (perbedaan) kebenaran dari kepalsuan. Karena itu, barangsiapa menolak tirani (thāghūt) dan percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya ia telah berpegangan kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,*” (Q 2:156). Kedewasaan umat Islam dan kemantapan mereka kepada diri sendiri telah terbukti dalam sejarah masa lampau, dan dapat sepenuhnya diulangi untuk masa kini dan masa mendatang. Seperti telah dikemukakan di atas, kedewasaan dan kemantapan umat Islam itulah yang memungkinkan mereka memegang kepemimpinan dalam kemajemukan masyarakat Timur Tengah sampai sekarang. Hanya imperialisme Barat yang mengganggu keserasian sosial yang plural di negeri-negeri Muslim itu dengan diciptakannya tragedi-tragedi yang sangat ironis seperti adanya “*Israeli*” dan krisis Palestina. Sementara itu dapat dikatakan bahwa adanya kesadaran umat Islam terdahulu dan kemampuannya untuk hidup dalam semangat pluralisme sosial pada tahap perkembangan sejarah dunia yang begitu dini adalah merupakan mukjizat sendiri yang mendukung keteguhan agama Islam.

Tetapi, tentu saja kebebasan beragama bukanlah satu-satunya atau segi terpenting konsekuensi Pancasila. Justru yang mula pertama dituntut untuk dilaksanakan sebaik-baiknya ialah masing-masing sila yang lima itu. Kita perhatikan bahwa sila-sila itu belum seluruhnya terlaksana dengan baik, sampai sekarang. Suatu kekecualian barangkali ialah sila Persatuan Indonesia. Sungguh, terwujudnya persatuan tanah air sampai sekarang ini merupakan jasa dan kredit yang luar biasa pentingnya dari “bapak-bapak pendiri Republik”, sejak dari mereka yang memelopori penggunaan bahasa kebangsaan diteruskan oleh angkatan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan politik bangsa dengan Bung Karno sebagai simbol dan sumber ilham bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, sampai pada pengorbanan angkatan bersenjata

dalam menyelesaikan berbagai pergolakan daerah. Juga tidak boleh kita lupakan peranan agama Islam sebagai agama yang paling merata di seluruh tanah air, sehingga karenanya memberi kontribusi yang tidak kecil dalam bentuk pelancaran komunikasi kultural antar-berbagai suku kita, dan ikut mempermudah penerimaan dan pengembangan bahasa nasional. Kemudian di zaman Orde Baru, Persatuan Indonesia itu memperoleh bentuk konkretisasinya lebih lanjut sebagai akibat langsung pembangunan ekonomi, kemantapan keamanan, dan kelancaran komunikasi (dilambangkan dan diefektifkan oleh satelit “Palapa”).

Tetapi tidaklah demikian halnya dengan pelaksanaan sila-sila yang lain. Bahkan pelaksanaan sila pertama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menurut Bung Hatta merupakan sila utama yang menyinari sila-sila yang lain, juga tidak luput dari persoalan. Misalnya, di zaman Orde Lama, ketika orang juga mengaku sepenuhnya berfilsafat Pancasila, kita masih bisa kebobolan oleh pandangan bahwa kebebasan yang disangkutkan dengan sila pertama itu juga boleh ditafsirkan sebagai *kebebasan tidak beragama*. Sekarang kita boleh merasa lega dan bersyukur bahwa sponsor ide kebebasan tidak beragama itu telah dilarang tampil. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa pelaksanaan sila pertama itu sudah tidak lagi mengandung persoalan. Misalnya, beberapa waktu lalu terjadi perdebatan tentang apakah ajaran Kong Hu Cu suatu agama, dan bila suatu agama, apakah dapat digolongkan ke dalam jenis agama ber-Ketuhanan Yang Maha Esa? Jika jawabnya positif, maka masalahnya mudah. Tetapi jika negatif, maka menyangkut persoalan berikutnya, yaitu sikap apa yang paling tepat yang harus diambil terhadap para pengikut Kong Hu Cu? Melarang ajaran itu dan memaksa penganutnya pindah agama? Lalu, sampai di mana hak kita melakukan hal demikian, mengingat agama ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri, khususnya agama Islam, sebagaimana dikemukakan tadi, mengajarkan prinsip bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama?

Sementara terdapat persoalan dalam pelaksanaan sila pertama itu pada tingkat nasional, namun dalam tingkat agama Islam tidak ada ajaran yang jelas daripada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri. Justru agama ini selalu menegaskan bahwa seluruh semangat ajarannya berpusat pada paham Ketuhanan Yang Maha Esa itu, yang secara istilah teknisnya disebut tauhid. Sepanjang ajaran Islam, tauhid itulah ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa secara sebenarnya, yang pengajarannya secara lebih sistematis dimulai oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang bangsa Israel (Yahudi) dan bangsa Arab (terutama Quraisy). Karena Nabi Muhammad menyeru manusia untuk kembali pada ajaran pokok dan murni Nabi Ibrahim itu, maka ada orang yang memandangnya sebagai seorang Yahudi fundamentalis. Sebab di antara kelompok-kelompok manusia saat itu yang mengaku sebagai pengikut setia Nabi Ibrahim ialah orang-orang Yahudi atau keturunan Nabi Ya'qub (Israel). Dan orang-orang Yahudi itu biasa memandang kepercayaan Kristen dengan paham Trinitasnya sebagai penyelewengan dari monoteisme Nabi Ibrahim (lihat di atas). Tetapi persoalannya bukanlah Nabi Muhammad itu seorang Yahudi atau Kristen, begitu pula halnya dengan Nabi Ibrahim. Persoalannya ialah bahwa Nabi Muhammad menyeru umat manusia kembali kepada kemurnian agama Ibrahim, sebab Ibrahim adalah seorang penganut agama yang benar (*hanif*) dan yang pasrah kepada Tuhan (*muslim*), tanpa terikat kepada kelompok-kelompok agama tertentu, dan dia tidak termasuk orang-orang yang percaya kepada tuhan banyak atau politeisme (lihat Q 3:67).

Di sini rasanya perlu diulangi penegasan bahwa agama Islam, sekalipun menyeru manusia kepada Ketuhanan Yang Maha Esa melalui ajakan persuasif (dakwah), namun ia dengan tegas menganut paham tidak boleh ada paksaan dalam agama. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa melaksanakan prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama, sepanjang ajaran Islam, adalah berarti memenuhi konsekuensi paham tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa secara benar. Sebab, menurut keyakinan Islam, adalah

Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang mengajarkan, melalui wahyu-Nya, yaitu al-Qur'an, bahwa kita harus menganut prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama. Justru salah satu reputasi Islam yang mengagumkan ialah kesetiaannya kepada prinsip ini, yang memungkinkan tetap hidupnya agama-agama Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) di negeri-negeri Muslim yang kemudian pengertian Ahli Kitab itu pernah diperluas untuk meliputi pula agama-agama lain selama agama-agama itu berpegang pada suatu Kitab Suci tertentu seperti Hindu dan Budha. Karena itu dapat dikatakan pula, selama berkenaan dengan Islam, berpegang pada prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama serta kebebasan menganut keyakinan adalah berarti pelaksanaan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dipandang secara tepat oleh Bung Hatta sebagai sila utama Pancasila.

Dari sudut pandangan di atas itu, maka jelas sekali bahwa kaum Muslim Indonesia akan berbuat sangat banyak untuk Pancasila dan negara jika mereka memahami lebih baik agama mereka sendiri dan mengamalkannya dengan setia. Dengan menjadi seorang Muslim yang baik, seorang Indonesia penganut Islam akan sendirinya menjadi warga negara yang baik pula. Oleh karena itu, kaum Muslim Indonesia harus melaksanakan hak sah mereka dalam Pancasila, yaitu hak untuk memahami dan mengamalkan agama mereka secara sepenuh-penuhnya. Kaum Muslim dapat mengamalkan Pancasila hanya jika mereka memahami dan mengamalkan agama mereka secara benar. Tidak ada sumbangan yang lebih besar yang bisa diberikan oleh kaum Muslim Indonesia kepada negara daripada pelaksanaan yang bebas dan tulus akan ajaran-ajaran agama mereka, yaitu Islam.

Melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam itu bagi kaum Muslim tidak hanya merupakan *hak* mereka dalam rangka mengamalkan Pancasila. Bahkan merupakan kewajiban mereka, sebagai konsekuensi paham Ketuhanan Yang Maha Esa, yang paham itu sendiri merupakan sila utama Pancasila seperti disebutkan tadi. Jadi bagi warga negara Indonesia yang Muslim, kewajiban menjalankan agama-

nya secara murni, benar, dan bebas bukan hanya kewajiban keislaman, tapi sekaligus kewajiban kepancasilaan. Dengan setia kepada Islam, kaum Muslim menunjukkan kesetiaannya kepada Pancasila.

Hal demikian, karena rumusan nilai-nilai (kesepakatan) yang tercantum dalam mukaddimah UUD kita dan terkenal dengan Pancasila itu bukanlah sesuatu yang datang entah dari mana. Bukan pula ia merupakan wahyu langsung dari Tuhan kepada salah seorang siapa saja dari bangsa Indonesia. Memang benar Bung Karno gemar bercerita tentang “wangsit” yang diterimanya di waktu-waktu menjelang pencetusan rumusan menurut versinya sendiri. Tapi jelas ia tidak mengaku sebagai menerima wahyu seperti halnya para nabi. Justru yang sering ia tegaskan ialah bahwa ia mengangkat nilai-nilai itu dari *kenyataan* masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, isi dan wujud nilai-nilai itu ada dalam masyarakat, dan dapat berfungsi sebagai titik-titik persamaan dan kesepakatan antara berbagai kelompok bangsa kita karena tentunya nilai-nilai itu — betapapun bentuknya — sudah ada terlebih dahulu dalam masyarakat. Dan di antara masyarakat Indonesia itu, malah yang paling besar dan tersebar paling merata, ialah masyarakat umat Islam. Jadi berarti bahwa mengamalkan ajaran-ajaran Islam akan dengan sendirinya mencakup pengamalan nilai-nilai yang kemudian diangkat pada tingkat nasional menjadi Pancasila itu. Dengan begitu kita melihat adanya hubungan yang alami antara Pancasila dan umat Islam Indonesia. Apalagi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Bung Karno, seorang yang sangat jauh terlibat dalam perumusan Pancasila, bahkan secara benar ataupun salah disebut-sebut sebagai “penggali” rumusan itu, sepanjang pengakuannya sendiri adalah seorang Muslim yang yakin. Sedangkan Bung Hatta, orang kedua terpenting dalam kaitannya dengan UUD dan Pancasila, bahkan yang pada saat-saat tertentu adalah orang pertama paling menentukan (seperti, misalnya, dalam pengesahan UUD 45), adalah seorang Muslim yang sangat saleh dan berakhlak mulia. Demikian pula tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Muhammad Yamin dan Achmad Subardjo adalah orang-orang Islam. Di atas itu semua,

umat Islam Indonesia dalam pertumbuhan perumusan nilai-nilai kesepakatan Pancasila itu diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka yang terbaik dan paling utama saat itu, yaitu Haji Agus Salim, A. Wahid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, dan Abdul Kahar Muzakkir.

Di atas telah dikemukakan pandangan bahwa kaum Muslim Indonesia akan memberikan jasa dan sumbangan amat besar kepada negara dan bangsa Indonesia dengan jalan mengamalkan ajaran-ajaran agama mereka secara benar, bebas, dan tulus. Kesempatan serupa itu dijamin oleh Pancasila, sebagai Konstitusi Madinah dulu juga menjamin kesempatan serupa bagi kaum Muslim Madinah di bawah pimpinan Rasulullah *saw*. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kaum Muslim Indonesia daripada menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu, sebagaimana hal itu juga diperbuat oleh Rasulullah *saw* dan para Sahabat beliau.

Kewajiban umat Islam itu semakin jelas tampak jika kita memandang masa depan perkembangan bangsa dan negara kita. Sekalipun kita patut, malah wajib, bersyukur atas perkembangan negara dan bangsa kita, namun, sebagaimana telah ditegaskan dalam bagian-bagian pertama tulisan ini, kita tidak akan berhenti puas dan sampai sekian saja. Adalah tidak masuk akal untuk menganggap bahwa apa yang ada sekarang adalah sempurna dan final, yang tidak lagi memerlukan perbaikan dan pengembangan secara meningkat lebih lanjut.

Berkenaan dengan perkembangan masa depan bangsa itu, marilah kita kembali sejenak kepada soal pelaksanaan sila pertama Pancasila tadi. Semangat dan kesadaran Berketuhanan yang Maha Esa, atau yang dalam Islam secara teknis disebut takwa (*taqwā*), adalah sesungguhnya inti ajaran keagamaan (Islam), dan puncak kesadaran keagamaan itu yang menentukan tinggi-rendahnya martabat seseorang di hadapan Tuhan (Q 49:13). Karena letaknya yang sangat mendalam dalam lubuk hati manusia, maka takwa adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah (Q 5:8). Takwa adalah suatu bentuk peningkatan dari keyakinan kepada Tuhan

atau iman, dan merupakan wujud tali hubungan dari Allah kepada manusia (*ḥabl min Alāh*), satu dari dua dimensi hidup manusia yang bersifat vertikal. Ia amat *personal* sifatnya, tanpa hak atau kemampuan orang lain untuk ikut campur. Tetapi ia menuntut konsekuensi yang bersifat sosial, dan konsekuensi itu merupakan dimensi kedua kelengkapan hidup manusia, yaitu dimensi horizontal, bentuk tali hubungan dari manusia kepada sesamanya (*ḥabl min al-nās*). Pengejawantahan dimensi ini melahirkan tindakan-tindakan yang secara teknis keagamaan disebut amal saleh, kadang-kadang juga dinamakan akhlak karimah, atau budi pekerti luhur, yang kesemuanya itu merupakan penerjemahan lebih lanjut dari prinsip perikemanusiaan. Karena sifatnya yang sosial, maka di bidang ini dibenarkan adanya ikut campur antara sesama manusia. Maka dari itu, di sini diperlukan adanya unsur kesepakatan antara individu-individu maupun kelompok-kelompok kemasyarakatan yang menjadi anggota dalam kesatuan sosial yang lebih besar. Di sinilah pangkal-mula kehidupan bernegara secara nyata atau lahiriah yang menyangkut kepentingan semua warga negara. Kebaikan budi dan tingkah laku seseorang tidak hanya terbatas manfaatnya untuk diri yang bersangkutan saja, tetapi juga akan membawa pengaruh kebaikan pula kepada orang-orang lain dalam masyarakat. Sebaliknya, kejahatan seseorang tidak hanya membawa akibat buruk kepada diri pelaku bersangkutan itu sendiri, tetapi juga akan berpengaruh buruk pula kepada orang-orang lain dalam masyarakat, termasuk dan tak terkecuali kepada anggota-anggota masyarakat yang baik-baik (lihat peringatan akan adanya *hukum sosial* — *sunnah Allah* — ini dalam Q 7:25). Itulah sebabnya maka dalam tingkat kegiatan ini terdapat kemungkinan dibenarkannya adanya ikut campur sesama anggota masyarakat, khususnya bentuk ikut campur (secara sah) melalui kehidupan bernegara. Ini pula yang menyebabkan kita harus memilih sistem politik terbuka, yaitu demokrasi, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Jika kita mengikuti cara Bung Hatta melihat Pancasila, yang dengan cara itu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipandang sebagai

sila utama yang menyinari sila-sila lainnya dan menjadi dasar etis bagi sila-sila itu, maka kita juga bisa mengatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila vertikal, dan sila-sila selanjutnya adalah sila-sila horizontal. Malah sesungguhnya dari sudut pandangan Islam, keempat sila lainnya dalam Pancasila itu merupakan beberapa konsekuensi logis keagamaan dan kesadaran Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kesadaran Berketuhanan Yang Maha Esa itu, atau lebih tegasnya, takwa kepada Allah dan memperoleh rida-Nya, adalah dasar bangunan kehidupan yang benar (Q 9:110). Sejalan dengan itu, UUD 45 kita mengatakan pada pasal 29 ayat 1 bahwa negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin dari sudut pandangan ini pula sehingga Mohammad Natsir, salah seorang tokoh Islam Indonesia, mengatakan dalam pidatonya di Pakistan pada tahun 50-an bahwa Republik Indonesia pun tidak kurang keislamannya dibanding Pakistan, karena Indonesia "*has put the monotheistic belief in the one and only God at the head of the Pancasila — The Five Principles adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and the nation*".⁵

Keempat sila lainnya itu tidak hanya merupakan pancaran logis sila pertama, melainkan juga mendapat penegasan-penegasan positif dalam ajaran agama. Di atas telah kita bicarakan hubungan langsung sila Kemanusiaan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan akan terdengar berlebih-lebihan jika di sini dikatakan, ajaran agama (Islam) menghargai sila Persatuan. Hal itu sudah lebih jelas. Kemudian salah satu prinsip kemasyarakatan yang amat fundamental dalam Islam ialah prinsip musyawarah atau *syūrā*. Telah kita bicarakan cukup panjang tentang bagaimana Rasulullah *saw* dengan setia mengadakan permusyawaratan dengan para Sahabat beliau dan dengan golongan-golongan di luar Islam yang

⁵ Lihat, "Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs", Data paper no. 16, (Ithaca, NY: Cornell University, 1954, h. 4).

antara lain kemudian menghasilkan Konstitusi Madinah. Karena prinsip *syūrā* inilah, maka penerimaan umat Islam akan demokrasi modern bersifat sangat alami. Demikian pulalah halnya dengan letak prinsip menegakkan keadilan dalam ajaran agama. Menegakkan keadilan itu malah disebut sebagai tindakan yang paling mendekati takwa kepada Allah (Q 5:8). Juga kita dapatkan bahwa menegakkan keadilan adalah amanat Tuhan kepada umat manusia dalam berpeperintahan dan berkehidupan sosial (Q 4:58).

Tetapi berbeda dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pelaksanaannya menyangkut suatu pengalaman keagamaan yang paling mendalam dan hanya berdasarkan kepada iman serta penerimaan total ajaran-ajaran dalam wahyu yang tidak bisa lagi diper-musyawaratkan, maka pelaksanaan sila-sila horizontal ini, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut segi-segi teknisnya, senantiasa memerlukan partisipasi terbuka dari setiap anggota masyarakat. Kesemuanya itu berdimensi sosial, dan karenanya terkena oleh hukum-hukum pergaulan antarmanusia sebagai manusia.

Tetapi barangkali tidak ada persoalan masa depan bangsa kita ini yang lebih penting dan lebih serius daripada persoalan menegakkan etika atau akhlak bangsa. Di sinilah umat Islam dapat memberikan sumbangannya secara maksimal. Secara introspektif, kita harus mengakui bahwa dalam hal etika, bangsa kita masih cukup lemah, jika tidak sangat lemah. Meskipun sebagian besar rakyat beragama Islam, tetapi salah satu tujuan ajaran Islam sebagai *al-furqān*, yaitu pemisah yang tegas antara yang *ḥaqq* (benar) dan yang *bāthil* (palsu) belum sepenuhnya dihayati oleh seluruh warga negara. Sudah tentu kita bisa menunjuk pengaruh berbagai ajaran negatif di luar Islam. Tetapi hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab kaum Muslim untuk mempertajam pemahaman terhadap agamanya dan memperkuat pengamalan ajaran-ajarannya sehingga semangat *al-furqān* itu dapat terwujud secara nyata dalam masyarakat luas.

Kelemahan etika bangsa yang antara lain akibat lemahnya semangat *al-furqān* di kalangan kaum Muslim itu tercermin dalam ketidakmampuan banyak penanggungjawab kenegaraan kita untuk

membedakan dengan jelas mana benar mana salah, mana kejujuran mana penyelewengan, mana terpuji mana tercela, dan ... *last but not least*, mana kontribusi dan mana korupsi. Kelemahan etika atau akhlak ini pula yang menyebabkan mengapa sering terjadi suatu penyelewengan itu dalam ukuran amat besar dan bersifat fatal, ternyata dapat dimaafkan dan dilupakan begitu saja. Kelemahan etika ini pula menyebabkan banyak pemimpin dan penanggungjawab kenegaraan, sementara rajin mengucapkan ritual-ritual nasional seperti pernyataan kesetiaan kepada UUD dan Pancasila, namun tidak memiliki kepekaan secukupnya terhadap masalah-masalah sosial, dan tidak menyadari adanya berbagai kepincangan dalam masyarakat.

Adalah suatu ironi bahwa suatu bangsa yang sering disebut sebagai bangsa yang sopan, halus, dan berbudaya tinggi (“Bangsa Timur”), juga sekaligus sering disinyalir sebagai bangsa berbudaya korupsi. Jika memang dalam kenyataan korupsi merupakan aturan, sedangkan kejujuran serta kontribusi merupakan perkecualian, sinyalemen serupa itu tentunya tidaklah terlalu jauh dari benar.

Kelemahan etika, yang dari sudut pandangan Islam merupakan akibat lemahnya semangat *al-furqān* tadi, juga tercermin dalam hal-hal paradoksal bangsa kita. Misalnya, sementara sebagian suku bangsa kita, seperti suku Jawa, dikenal sebagai masyarakat yang amat kuat berpegang pada tradisi, namun kenyataannya mereka pula yang paling mudah menerima paham asing yang radikal seperti komunisme. Suku Jawa itu memang 90% atau sekitar itu beragama Islam. Tetapi tampaknya keislaman itu pada sebagian besar mereka sedemikian lemahnya sehingga masih memungkinkan tumbuh-suburnya kecenderungan-kecenderungan relativistik dalam semangat sinkretisme. Relativisme sinkretisme inilah yang senantiasa membukakan pintu bagi masuknya paham-paham asing tanpa saringan yang cermat, sebab relativisme serupa itu menimbulkan ketumpulan dalam mengenali kebenaran dari kepalsuan. Segala sesuatu selalu dilihat sebagai gradasi yang lembut, yang susunan dan tempat bagian-bagiannya bisa ditukar-tukar tanpa menimbulkan akibat-akibat serius.

Di bagian permulaan tulisan ini telah kita ajukan keberatan kita kepada absolutisme. Sebab absolutisme merupakan pangkal kesewenang-wenangan dan tirani. Dan di sini pun kita ingin mengemukakan keberatan kita kepada relativisme sinkretis. Sebab relativisme semacam itu akan membuat etika kita berjalan gontai. Ia membuat mata hati kita rabun, sehingga kriterium benar dan salah menjadi kabur.

Jika disebutkan suku Jawa, tidaklah berarti persoalan relativisme sinkretis hanya ada pada orang-orang Jawa. Persoalan itu jelas pada orang-orang Jawa, sebab antara lain suku itu adalah suku terbesar di Indonesia, tambahan lagi mereka mempunyai tradisi kebudayaan tertulis paling kuat dan paling lama. Tetapi relativisme sinkretis itu sesungguhnya juga terdapat, banyak ataupun sedikit, dalam satu dan lain bentuk, pada suku-suku lain. Karena itu adalah kewajiban umat Islam yang merata di seluruh Indonesia untuk mengembangkan pemahaman terhadap agamanya secara benar dan melaksanakan agama itu secara benar pula.

Rasanya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dengan pemahaman dan pengamalan penuh ajaran-ajaran Islam oleh pemeluknya, maka kita bisa berharap bahwa sendi-sendi etis negara Pancasila ini akan tegak, dan tegaknya sendi-sendi itu akan membawa tegaknya bangsa. Tanpa sendi-sendi etis yang kukuh itu, maka bangunan kemasyarakatan akan lemah bagaikan istana kertas yang tidak mampu bertahan terhadap tiupan badai berbagai krisis akibat kelemahan manusia sendiri. Dan sumbangan Islam di bidang ini untuk Indonesia akan sangat ril, mengingat bahwa Islam merupakan anutan sebagian besar rakyat.

Memang ada benarnya jika dikatakan bahwa akhlak bangsa atau etika nasional tumbuh kuat sebagai hasil mantapnya pranata-pranata dan susunan sosial-politik kelompok bersangkutan. Etika bangsa Amerika misalnya, tumbuh kuat oleh adanya pranata dan struktur demokrasi bangsa itu yang kuat dan mantap. Tetapi kiranya patut juga diingat bahwa adanya keputusan untuk memilih pranata dan struktur kemasyarakatan tertentu, dan tidak lainnya,

adalah akibat adanya komitmen pada tingkat individu-individu, kemudian tingkat masyarakat, kepada nilai-nilai etis dan pandangan hidup tertentu pula. Dalam hal bangsa Amerika, telah diketahui peranan etika Kristen, khususnya kaum Puritan, yang dibawa oleh para imigran dari Eropa Barat. Etika yang semula khusus kaum Puritan itu kemudian dinasionalisasikan, dan kini telah menjadi milik keseluruhan bangsa tanpa memandang asal-usul etnis dan kepercayaan mereka. Dalam suatu analogi, persis benar atau kurang, kita juga bisa bicara tentang Indonesia dengan peranan agama Islam sebagai sumber terpenting etika bangsa, antara lain karena agama itu merupakan anutan bagian terbesar rakyat.

Dalam mendukung tugas kewajiban itu, yang paling mendesak bagi umat Islam ialah meningkatkan dan memperluas pemahaman segi-segi ajaran agamanya yang sifatnya universal kemanusiaan. Membicarakan agama tidaklah terbatas pada pembicaraan hal-hal konvensional di kalangan umat seperti fiqh atau syariat saja. Hal-hal yang kurang relevan dengan masyarakat hendaknya diimbangi, kalau tidak malah diganti, dengan hal-hal yang merupakan segi-segi universal Islam, sumber etika umat. Ini tidak saja akan mengantarkan kita kepada segi-segi yang paling fundamental dalam agama, tetapi juga akan membuat kita lebih komunikatif dengan umat manusia sejangad, mengingat bahwa Islam adalah agama dari Tuhan sebagai rahmat untuk seluruh alam, di mana manusia adalah puncak alam itu. Segi-segi universal ajaran Islam itulah, khususnya sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci, yang masa lampau terlebih dahulu dihayati oleh kaum Muslim dan menjadi dasar etis di zaman Rasulullah *saw* dan para Khalifah yang bijaksana (*al-Khulafā' al-Rāsyidūn*), yaitu pada masa jauh sebelum adanya perdebatan dan perumusan tentang “fiqh” dan “syariat” yang sangat mendetil dalam Islam.

Melihat tahap perkembangan sekarang ini, cukup banyak alasan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia untuk merasa optimis. Sarana-sarana keagamaan sudah tersedia banyak, dan kaum Muslim sudah semakin kaya dengan wawasan-wawasan baru. Menopang itu semua

ialah pertumbuhan yang amat pesat dari kaum terpelajar dan generasi muda yang mewujudkan kesungguhan dalam beragama. Barangkali inilah hasil nyata terpenting adanya kemerdekaan nasional, mengingat di zaman kolonial kaum Muslim terhalang dari kebebasan beragama dan memperoleh pendidikan wajar dan modern.

Dengan pertumbuhan intelektual Muslim dalam jumlah yang melimpah dan mutu yang meningkat itu, harapan semakin besar untuk seluruh bangsa. Kemampuan jumlah besar orang-orang Muslim untuk mengambil bagian dalam kehidupan modern menambah kemantapan mereka kepada diri sendiri. Kemantapan itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang lebih positif dan konstruktif, yang merupakan sumbangsih mereka bagi negara bersama, Republik Indonesia. Gejala-gejala radikal dan ekstrem di sebagian umat, meskipun yang nyata membawa bencana tidak dimaafkan, namun sesungguhnya merupakan indikasi adanya proses perubahan sosial yang cepat dari dalam mereka, dan bisa membantu keseluruhan umat untuk mendapatkan keseimbangan baru di berbagai bidang. Kasus-kasus negatif tidak perlu menutupi kita dari kenyataan lain yang positif, yaitu peningkatan menyeluruh umat. Dengan peranan positif lebih besar dari umat itu, khususnya golongan terpelajar mereka, konsep keseluruhan keindonesiaan akan semakin memperoleh bentuknya yang tegas. Dan dengan peningkatannya itu pula umat Islam dapat lebih baik memenuhi fungsinya sebagai kelompok penengah (*ummah wasath*) atau golongan *moderator* dan saksi kemanusiaan (Q 2:143), serta menunaikan tugas sucinya amar makruf nahi munkar, karena iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, takwa kepada-Nya serta rida-Nya.

Penutup

Mengakhiri pembahasan di bagian ini, suatu kesimpulan ringkas ialah bahwa umat Islam, sepanjang ajaran agamanya, tidaklah menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama,

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *saw* dan sahabat beliau. Ukuran kebaikan itu tidak harus disesuaikan dengan kepentingan golongan sendiri saja, sebab akhirnya agama Islam disebut sebagai rahmat Allah bagi seluruh alam, umat manusia. Ukuran kebaikan itu ialah kemanusiaan umum sejagad, dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum Muslim pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial politik. Atas dasar etika asasi itu seorang Muslim memilih suatu pandangan sosial-politik tertentu yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua. Untuk tujuan itu pula ia bekerja sama dengan orang-orang lain, dalam semangat kemanusiaan yang terbuka. Kerjasama itu dapat melahirkan perjanjian dan kesepakatan, sedangkan umat Islam adalah “*Mereka yang setia pada perjanjian, bila mereka telah membuat ikatan perjanjian itu,*” (Q 2:77). Selanjutnya adalah kewajiban umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana hal itu merupakan hak sah mereka yang dijamin oleh perjanjian, dan kewajiban keagamaan mereka pula untuk mengajak semua kelompok untuk melaksanakan bersama perjanjian tersebut. [❖]